

# Beberapa Bentuk Konkret Kontribusi Pengusaha dalam Pembangunan Nasional

KWIK Kian Gie\*

Pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Masyarakat nasional Indonesia, seperti juga dengan masyarakat-masyarakat nasional lainnya, terdiri dari berbagai jenis bagian masyarakat (sub communities), seperti masyarakat politik, masyarakat ilmiah, masyarakat artistik, masyarakat keagamaan, masyarakat bisnis, dan lain-lain. Masyarakat bisnis merupakan sekaligus dunia usaha dan ruang lingkup kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi keperluan konsumtif, dan melalui proses produksi dan konsumsi ini membentuk pendapatan nasional. Maka sesuai dengan peranan alamiahnya dan berdasarkan kemampuan teknikalnya, masyarakat bisnis ini secara terpadu dengan bagian-bagian masyarakat lainnya, turut mewujudkan apa-apa yang dicita-citakan oleh negara bangsanya.

Bertitik tolak dari kerangka acuan ini, jelaslah bahwa dunia usaha dan kewiraswastaan merupakan bagian tak terpisahkan dari total community kehidupan bernegara dan berbangsa, dan dengan sendirinya mempunyai peranan yang sangat besar, karena hakikatnya yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan produktif dalam menyediakan barang dan jasa bagi seluruh anggota masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan submasyarakat lainnya, masyarakat bisnis dalam artian yang luas pada tubuhnya melekat potensi konflik yang rumit dengan sub communities lainnya. Disatu pihak, masyarakat bisnis cenderung dianggap hidup dengan tata nilai dan patuh pada kekuatan-kekuatan di dalam dunia bisnis yang serba materialistis. Perasaan ini dalam bentuk ekstremnya

---

\*Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Prasetya Mulya yang disuruh mengawasi Bidang Akademis dari Institut Manajemen Prasetya Mulya.

menganggap masyarakat bisnis sebagai pengelompokan orang-orang yang merupakan business animal, orang yang di dalam hidupnya hanya mengenal berbisnis dan mencari uang, tanpa peka dan memperdulikan terhadap nasib masyarakat sekelilingnya. Dilain fihak, bisnis dalam artian yang luas, di mana faktor yang menonjol adalah kemampuan manajerialnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, sangat dibutuhkan oleh para produsen dan konsumen dari barang-barang yang sifatnya memenuhi kebutuhan intelektual dan spiritual seperti lukisan, hasil seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Artinya, walaupun bisnis mudah dirasakan sebagai bertentangan dengan tata nilai yang berlaku dan dianggap baik oleh submasyarakat lainnya, pada tubuhnya, bisnis mengandung faktor penting dalam bentuk kemampuan manajerial, yang justru sangat dibutuhkan oleh submasyarakat yang memusuhinya.

Persepsi yang salah terhadap dunia bisnis dari masyarakat non-bisnis disatu fihak, dan perilaku para usahawan sendiri yang kebanyakan buta terhadap lingkungan non-bisnisnya, seringkali mengakibatkan ketegangan antara submasyarakat lainnya terhadap dunia bisnis. Oleh karena itu, masalahnya perlu dikaji lebih mendalam untuk menyelaraskan persepsi di antara berbagai submasyarakat, terutama antara masyarakat bisnis dan submasyarakat lainnya.

Bahwa Pemerintah Orde Baru mengakui sangat pentingnya peranan dunia usaha dan kewiraswastaan untuk pembangunan nasional, kiranya bagi semua orang telah jelas. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan dijelaskan oleh para pemimpin negara kita, bahwa tata ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran, di mana sektor negara dengan BUMN-BUMN-nya, Koperasi yang menghimpun kegiatan bisnis rakyat dan sektor swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, diberi kesempatan berusaha yang sebesar-besarnya. Tetapi toh pada saat-saat tertentu kita dengarkan suara antipati terhadap sektor swasta, yang oleh sebagian orang dirasakan bahwa kegiatan sektor swasta cenderung membawa masyarakat kita kepada kapitalisme yang keji dan pada hakikatnya menindas kepentingan rakyat banyak yang miskin. Beberapa fihak bahkan mempermasalahkannya secara lebih ekstrem, sehingga hampir tidak ada bedanya dengan pandangan-pandangan yang didasarkan atas faham seperti Marxisme-Leninisme dan Marxisme-Maoisme. Saya katakan ini, oleh karena beberapa fihak secara prinsipial mempermasalahkan apakah pemilikan modal oleh swasta di dalam alam Indonesia yang ber-Pancasila dapat dibenarkan.

Banyak teori, subteori, dan bahkan kuasi teori sering dipakai orang untuk melakukan pembahasan di berbagai kesempatan dan media masa. Kalau kita ambil intinya, maka hakikat yang dipermasalahkan adalah apakah pemilikan

modal oleh swasta diperorangan dibenarkan, dan apakah pembangunan nasional Indonesia boleh memberikan tempat kepada unit-unit produksi yang dimiliki oleh perorangan. Selama masalah ini tidak jelas atau dibuat tidak jelas oleh kelompok yang vokal dan memperoleh liputan yang luas oleh media masa, selama itu pula masyarakat akan meragukan peran serta dunia usaha dan kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.

Tadi telah dikatakan bahwa tata ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran antara BUMN, Koperasi, dan Swasta. Walaupun demikian, toh ada kelompok-kelompok ekstrem yang tidak mau menerima adanya sektor swasta. Yang kurang ekstrem, tetapi pada dasarnya cenderung tidak mau menerima peran sektor swasta, memperlakukan porsi pembagian sektor negara, koperasi dan swasta secara mendiskreditkan sektor swasta. Dilema ini adalah dilema klasik dan terdapat di mana saja. Debat mengenai ini juga sudah lama berlangsung dan terhimpun dalam buku dan tulisan-tulisan yang tidak terhingga banyaknya. Maka cukup saya katakan bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit untuk ditentukan secara terencana dengan eksak dan konkret. Walaupun demikian, porsi yang pernah diberikan kepada sektor swasta, dan swasta sudah menanam modalnya ke dalam bidang yang bersangkutan, hendaknya porsi ini jangan diubah-ubah di tengah jalan, kalau kita benar-benar ingin swasta mempunyai peran yang efektif bagi pembangunan nasional.

Eropa Barat, terutama di negara-negara yang disebutkan sebagai welfare states, cenderung untuk membatasi kegiatan bisnis oleh sektor negara sampai pada public utility yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan sektor swasta, dan dianggap penting bagi kehidupan rakyat banyak, yang langsung merupakan elemen penting bagi kemakmuran tingkat hidupnya, karena merupakan kehidupan pokok, seperti listrik, angkutan umum, air minum, telekomunikasi dan sebagainya. Pada hakikatnya, sektor negara hanya membatasi diri pada produksi barang dan jasa yang membutuhkan investasi sangat besar, sedangkan laba dari investasi yang bersangkutan menduduki tempat kedua, yang kalau perlu dikorbankan. Bagi negara-negara "welfare states" ini, pemilikan modal atau unit-unit produksi yang berapa pun besarnya oleh swasta tidak dipermasalahan. Bahkan lain daripada di Amerika Serikat yang mengenal "anti-trust law," Eropa Barat mengizinkan membesarnya satu atau dua perusahaan swasta tertentu, asalkan caranya adalah sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku, dengan memanipulasikan kekuatan-kekuatan pasar yang ada, dan tidak dengan cara-cara kotor seperti merusak barang dagangan saingannya untuk dilepas lagi ke pasaran, melakukan intimidasi para penyalur untuk memboikot barang-barang saingannya, memakai jasa-jasa mafia, melakukan bisnis dalam barang-barang terlarang seperti heroine dan sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, toh kita saksikan hampir runtuhnya sistem "welfare states" Eropa Barat, karena perusahaan-perusahaan hampir tidak

sanggup lagi menopang beban-beban sosial yang harus dipikulnya demi kesejahteraan buruh dan rakyat seluruh bangsanya melalui pajak yang berat dan premi untuk "social security system."

Menggunakan istilah yang lazim kita dengar, "welfare states" tidak berfikir dalam istilah kue yang harus dibagi-bagi, melainkan berfikir dalam istilah pohon yang harus sehat, besar, kuat dan berbuah banyak. Pohon boleh dimiliki oleh siapa saja, asalkan buahnya dibagi seadil mungkin. Sedemikian jauhnya akhirnya dunia usaha swasta di sana diperas, sehingga banyak yang tidak tahan, gulung tikar, dan pengusahanya mengalihkan modal dan usahanya ke negara lain, terutama Amerika Serikat.

Apa yang ingin dikemukakan dengan mengemukakan contoh welfare states ini adalah bahwa apabila peranan swasta dalam pembangunan nasional diakui dan oleh karena itu kepada swasta diberikan tempat, pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini akan membawa akibat ketimpangan dalam bidang keadilan sosial, asalkan kita pandai-pandai membagi secara adil laba yang dibuahkan oleh para pengusaha sektor swasta ini. Memang harus segera kita akui, bahwa pemerataan hasil usaha swasta, yang pemilikan unit-unit produksinya ada di tangan para pemilik modal swasta, membutuhkan sarana kemampuan manajerial dan administrasi yang besar dan "sophisticated." Sistem demikian juga membutuhkan aparat pemerintah yang sangat bersih dan berwibawa. Sistem ini membutuhkan penciptaan organisasi social security system, yang pada hakikatnya adalah asuransi raksasa secara nasional dengan perhitungan aktuarial yang rumit dan pencatatan yang cermat.

Kita semua memahami bahwa tahap perkembangan dalam pembangunan kita belum mencapai tingkat kesempurnaan yang demikian. Maka tidak mungkin bahwa kita mengharapkan dari masyarakat untuk memberikan peluang tanpa batas kepada pemilikan unit-unit produksi oleh para kapitalis, dengan pola berfikir pohon dan buah. Sebabnya karena pada saat ini tidak akan ada aparat yang mampu membagi buahnya, sehingga kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi para kapitalis memang hanya akan memberikan kesempatan kepada para kapitalis ini tanpa adanya 'trickle down effect' yang memadai.

Dalam masyarakat yang demikian, rakyat secara naluriah mengetahui dan merasakan bahwa mereka tidak banyak mendapat manfaat dari bekerjanya kaum kapitalis, kecuali mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang serba minimal.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa yang dimaksudkan tidak menentang kepemilikan modal oleh swasta, dan tidak menentang menjadi besarnya perusahaan-perusahaan swasta secara prinsipial. Tetapi pembengkakan ini

hanya dapat ditoleransikan apabila ada jaminan keadilan dari pembagian pendapatannya.

Dalam negara-negara maju "welfare states," di mana kemampuan manajerial dan administrasi untuk melakukan pemerataan laba sudah sangat memadai, pemisahan yang tegas antara segi pemilikan modal dan pembuatan laba di satu pihak, dan penggunaan labanya di lain pihak, terjamin. Karena pemilikan memberikan perasaan bahwa unit produksi mutlak adalah miliknya, dan karena pemilikan memberikan kebebasan untuk secara kreatif memajukan perusahaannya, maka faktor-faktor psikologis yang penting ini dibiarkan. Rakyat dan pemerintahnya merasa yakin akan dapat meratakan hasilnya secara adil. Dalam negara yang belum memiliki kemampuan-kemampuan ini, dari para pengusaha sendiri dituntut untuk menunjukkan kepekaannya terhadap lingkungan sosial sekitarnya, kepekaan terhadap para pelaku bisnis yang menjungahnya, dan yang menjadikannya besar.

Hal ini yang menurut pengamatan kurang disadari oleh para pengusaha di sini. Mereka selalu merasa heran dan mempertanyakan, kesalahan apa yang mereka perbuat, sehingga mereka cenderung untuk dimusuhi oleh pendapat umum, dan mereka cenderung dianggap sebagai business animal?

Secara rasional murni, selama mereka diberi tempat untuk berusaha, dibenarkan untuk memiliki unit-unit produksi yang berapapun besarnya, asalkan menuruti peraturan-peraturan legal yang ada, apa lagi yang harus mereka lakukan?

Dengan kepekaan terhadap sub communities di sekitarnya, jawabnya sebenarnya jelas. Di dalam negara yang maju, manfaat dari adanya mereka tercermin dan dapat dengan konkret dinikmati dalam bentuk berbagai macam kenikmatan dan kesejahteraan dari 'social security system' yang sebagian besar dibayar oleh produsen/kapitalis. Di Indonesia, pemerintah belum mempunyai program 'Social security' ini, sehingga memang sering dirasakan adanya kesenjangan yang besar antara kenikmatan yang diperoleh oleh pengusaha pemilik, dan 'stockholders' lainnya.

Jadi peranan pengusaha swasta dalam pembangunan nasional sangat besar, karena per definisi, apa pun yang dihasilkannya turut membentuk pendapatan nasional. Ini adalah per definisi, dan karenanya mutlak dan jelas. Namun pembangunan nasional menuntut pula keadilan, dan keselarasan tata nilai dari masyarakat bisnis dengan sub-submasyarakat lainnya.

Terutama bagi Indonesia yang masih dalam tahapan pembangunan, di mana pemerataan belum dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah sepenuhnya secara memadai, dari usahawan dituntut untuk bersadar diri,

berinisiatif mengembangkan berbagai macam upaya pemerataan menurut kemampuannya masing-masing.

Kini lalu timbul pertanyaan, bentuk-bentuk apakah yang bisa membantu para pengusaha untuk memperlunak pertentangan kepentingan ini? Bentuknya cukup banyak.

Banyak gagasan pernah dilontarkan di dalam berbagai diskusi dan tulisan. Dari yang sangat tidak masuk akal dan karenanya tidak dapat diterima, sampai pada gagasan-gagasan yang ngambang dan bernada sloganisme. Di samping itu banyak juga pengusaha yang telah memberikan baktinya yang sangat berguna dan nyata kepada masyarakat sekitarnya tanpa pamrih. Tetapi sayangnya, perbuatannya ini tidak dibarengi dengan publikasi yang memadai, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Upaya dan kegiatan-kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan dan diliput lebih luas oleh media massa.

Sekarang perlu dikemukakan bentuk-bentuk konkret yang dapat dilakukan oleh dunia bisnis swasta dalam rangka mewujudkan bakti kepada masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai perwujudan kepekaannya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitarnya.

## KETERKAITAN BISNIS

Arus barang dan jasa dari yang paling awal sampai ke barang jadi yang siap untuk dikonsumsi selalu melalui tahapan-tahapan produksi. Barang yang dihasilkan oleh satu perusahaan merupakan masukan bagi perusahaan selanjutnya, dan barang ini merupakan masukan lagi bagi perusahaan yang lebih dekat dengan barang yang siap untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.

Maka setiap perusahaan yang membutuhkan bahan masukannya selalu dihadapkan pada pilihan antara membuat sendiri bahan masukannya ini atau membeli dari perusahaan lain. Di dalam textbook gejala ini dikenal dengan istilah "make or buy." Textbook mengenai managerial accounting selalu mengajarkan teknik kalkulasi untuk tiba pada kesimpulan, manakah yang lebih menguntungkan antara membeli bahan masukannya atau membuat sendiri. Teknik-teknik ini murni-murni didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untung-rugi finansial.

Terutama bagi perusahaan-perusahaan berskala besar, mereka selalu akan tergelitik untuk mendirikan sendiri pabrik yang menghasilkan barang masukan bagi pabrik yang telah dimilikinya. Dengan berbuat demikian, maka

dia juga bisa menjadi pemilik pabrik, dan sekaligus terjamin pasarannya, karena sebagian besar dari produksi, (atau bahkan seluruhnya), sudah akan dapat diserap oleh pabriknya sendiri di dalam kelompok perusahaan-perusahaannya sendiri. Gejala ini dikenal dengan nama "backward integration." Sebaliknya, ada perusahaan yang melakukan "forward integration" dengan membentuk perusahaan yang dapat mengolah barang produksi dari perusahaan yang sudah ada sebagai bahan masukan perusahaan yang baru akan dibentuk.

Dalam rangka itikad pengusaha, yang tanpa disuruh atau dipaksa oleh undang-undang bersadar diri untuk mewujudkan pemerataan, hendaknya dalam memutuskan pilihan antara membeli barang masukannya atau membuat sendiri, kecuali pertimbangan-pertimbangan murni finansial, juga dimasukkan ke dalam pertimbangannya dengan bobot berat unsur memberikan prioritas kepada membeli dari pengusaha lain yang kecil. Bahkan kalau perlu menghimpun beberapa pengusaha kecil untuk bergabung mendirikan pabrik di bawah bimbingannya.

Contoh yang konkret adalah industri otomotif. Bagi mereka mudah sekali mendirikan pabrik pembuatan jok. Tetapi alangkah baiknya apabila ini diborongkan kepada perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang olehnya diberi penyuluhan-penyuluhan seperlunya. Terdengar bahwa banyak industri otomotif memang sudah menjalankan ini. Perbuatan ini patut dijadikan contoh bagi industri-industri lainnya.

## KETERKAITAN ASOSIASI

Dalam kasus-kasus tertentu, akan lebih efektif dan lebih murah biayanya apabila asosiasi dari perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok industri tertentu membantu peningkatan mutu dan pendapatan dari kelompok produsen yang menghasilkan barang-barang yang merupakan masukan bagi kelompok industri yang bersangkutan.

Contoh konkretnya adalah GAPPRI sebagai asosiasi pabrik-pabrik rokok kretek yang membiayai penyuluhan kepada para petani tembakau dalam rangka meningkatkan mutu, dan dengan demikian meningkatkan pendapatan para petani yang bersangkutan.

Dengan konsep dan jiwa yang sama, banyak upaya jenis dapat kita pikirkan dan kembangkan, terutama dalam bidang peternakan dan perkebunan atau pertambakan. PIR atau Perkebunan Inti Rakyat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan ini. Namun apabila dalam PIR ada keterkaitan kepemilikan yang rumit, gagasan ini lebih praktis dan lebih masuk

akal, karena pabrik pengolah hasil perkebunan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani yang sudah ada, bagaimana mereka bisa menghasilkan barang yang mutunya homogen dan cukup tinggi untuk diproses lebih lanjut oleh pabriknya. Contohnya adalah pabrik ikan kaleng Pronas yang tidak menangkap sendiri ikannya, tetapi membeli dari para nelayan yang dibimbingnya.

### PUSAT INFORMASI DAN CLEARING HOUSE

Sering kita dengarkan keluhan, bahwa walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas dalam bentuk KIK, KMKP, Kredit Canda Kulak dan sebagainya, pada umumnya para pengusaha kecil yang berhak atas segala fasilitas ini tidak dapat memanfaatkannya, karena tidak mempunyai pengetahuan bagaimana mereka dapat memperoleh kredit ini.

Setelah mereka dapat memperoleh berbagai macam kredit, peningkatan produksinya akhirnya tidak dapat dijual dengan harga yang memadai, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai kekuatan-kekuatan pasar yang ada, yang dapat menyerap produksinya dengan harga yang adil dan memadai.

Pengusaha besar, atau asosiasi-asosiasi pengusaha besar dan bank-bank dapat membentuk pusat-pusat informasi serta semacam "clearing house," yang mempertemukan para pengusaha kecil, menengah dan besar. Gagasan ini dalam berbagai kesempatan pernah dikemukakan oleh Prof. J. Panglaykim.

### PENGEMBANGAN INDUSTRI TRADISIONAL DI DAERAH SEKITARNYA

Sebagai perwujudan dari kepekaan sosial terhadap daerah lingkungan sekitarnya, pengusaha besar atau gabungan dari pengusaha besar dan menengah dapat memilih industri tradisional di daerah sekitarnya untuk dibantu pengembangannya.

Dalam usahanya ini, industri yang dibantu tidak perlu, dan bahkan biasanya tidak ada keterkaitan dengan bidang usaha dari yang membantu, karena sifat pengusaha yang membantu, yang bergerak dalam bidang industri modern, sedangkan yang dibantu adalah dalam bidang industri tradisional.

Contoh konkret yang pernah dilakukan adalah oleh PT Konimex, Matari Advertising, dan LPPM, di mana Konimex menyediakan modal, LPPM



menyediakan manajemen dan Matari Advertising menyediakan disain produk dan pemasarannya.

Penyuluhan dilakukan dengan cara memesan barang-barang sambil mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produsen. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, produsen dengan sendirinya akan terbina dalam perencanaan produksi, pembukuan, disain, dan kualitasnya. Fihak pengusaha yang membantu menggunakan kekuatan modalnya dengan cara membeli barang-barang produksi industri di Batur sambil mengatur. Proyek ini berhasil baik.

Sebelum ini, ada beberapa pengusaha kerajinan besi di Batur yang bangkrut justru setelah menang tender, karena salah membuat voorkalkulasi.

Sayang bahwa proyek-proyek semacam ini tidak diikuti oleh yang lain. Kasus ini dikemukakan sebagai contoh konkret dari upaya pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbisnis dari industri tradisional di daerah sekitarnya tanpa pamrih sama sekali, karena sifat industri yang dibantu, yang sama sekali tidak ada kaitan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang membantu.

## **PERUSAHAAN BESAR SEBAGAI PENGAYOM DAN PENYALUR BANYAK PERUSAHAAN KECIL**

Model ini banyak dilakukan di Jepang oleh Shogo Shosha, namun di Indonesia belum ada contohnya yang menonjol, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa secara tidak diketahui oleh banyak orang, sudah ada yang menjalankannya.

Dasar pemikirannya adalah produksi dari barang dengan merek tertentu dan spesifikasi kualitas tertentu yang standar dan uniform, dan yang produksinya tidak dilakukan oleh satu pabrik besar, melainkan dilakukan oleh beratus-ratus rumah tangga atau kelompok-kelompok kecil. KEPADANYA DIBERIKAN bahan baku dan bahan penolongnya, dan seluruh produksi dibeli oleh perusahaan yang memasarkannya dengan seluruh jalur distribusi yang dimilikinya. Dengan demikian, perusahaan distribusi ini tidak perlu memiliki pabrik sendiri, karena produksi bisa dilakukan oleh para pengrajin kecil di rumahnya sendiri-sendiri. Konsumen dijamin kualitasnya dengan suplai bahan baku dan pengawasan kualitas yang ketat oleh distributor pemberi pekerjaan. Hubungan kerja seperti ini banyak kita lihat di Jepang, Hongkong, dan Taiwan.

## MENGEMBANGKAN POTENSI WIRASWASTA MUDA

Kita sering mendengar adanya potensi pada beberapa pemuda untuk menjadi wiraswasta, tetapi terhambat karena tidak adanya modal equity. Walaupun dia memang mempunyai akses pada bank untuk memperoleh kredit, tetapi semua kredit hanya diberikan apabila pengusaha yang membutuhkannya dapat menyediakan sendiri sebagian dari modal yang dibutuhkan dalam bentuk modal sendiri atau modal equity.

Dasar pemikirannya adalah bahwa tidak ada pengusaha yang tidak menanggung risiko. Oleh karena itu, dengan proyek yang sudah dipersiapkan, direncanakan dan dihitung dengan matang, proyek bisa ditangani oleh wiraswasta muda yang tidak mempunyai modal equity. Modal equity disediakan oleh pengusaha besar dan modal pinjaman oleh bank. Wiraswasta diberi tanggung jawab manajemen dengan tingkat gaji yang sangat rendah, tetapi dengan bagian laba yang besar, misalnya 60%. Kepada wiraswasta muda yang akan diorbitkan ini diberikan opsi untuk membeli saham-saham dari perusahaan yang dipimpinnya. Uang yang dipakai untuk membeli saham ini adalah bagian labanya. Maka, bagian labanya tidak boleh dinikmati kecuali untuk membeli saham dari perusahaan yang dipimpinnya dalam rangka hak opsinya. Apabila perusahaan sudah menjadi miliknya, baik seluruhnya maupun sebagian besar (tergantung dari deal-nya semula), barulah dia bisa menikmati dividen.

Apabila dia berhasil memiliki perusahaan dengan konstruksi dan prosedur seperti ini, maka kecuali modal equity, pemilikan ini adalah hasil kerja keras dan hasil kemampuannya berusaha. Apabila dia gagal, pengusaha besar kehilangan modal equity-nya, dan dia kehilangan waktu dan nama baiknya.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku di dalam dunia usaha, wiraswasta muda yang berpotensi ini juga diharuskan menanggung risiko. Karena modal tidak dimilikinya, risiko yang ditanggungnya adalah risiko kehilangan waktu, tenaga, dan nama baik sebagai pengusaha yang mampu.

## KEGIATAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN OLEH PENGUSAHA

Sebagai perwujudan dari rasa peka dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya, beberapa pengusaha yang sukses dan kaya kadang-kadang merasa perlu memberikan baktinya dengan mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau pendidikan.

Yayasan semacam ini bisa merupakan gabungan dari banyak pengusaha, sehingga bagi masing-masing pengusaha tidak terasa berat, sedangkan dana

yang dihimpun cukup besar. Yayasan ini bisa juga didirikan oleh satu pengusaha atau satu perusahaan tertentu yang besar. Contoh konkretnya adalah Yayasan Prasetya Mulya, yang sudah banyak kita kenal kegiatan-kegiatannya. Terutama daerah-daerah luar Jakarta perlu mencontoh kegiatan-kegiatan semacam ini.

Kiranya uraian ini masuk akal, tidak normatif belaka, tidak sloganistik. Setelah berjerih-payah memikirkan bentuk-bentuk konkret dari apa-apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha besar/kuat untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil/lemah yang berpotensi, tanpa terjerumus pada bentuk-bentuk yang tidak masuk akal, dan tidak yang bersifat "mau menangnya sendiri," semoga mendapat sambutan dari pengusaha besar/kuat dan yang kecil/lemah.